

PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR

Dedy Pudja Wardana

Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dalam memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan variabel moderator. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan variabel moderator. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan bukan merupakan variabel moderator dalam memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menjadi dasar pertimbangan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan pembangunan manusia yang dilakukan secara komprehensif yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pembangunan Manusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat; serta antara kesejahteraan masyarakat dan individu. Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan pemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor development*).

Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antar daerah.

Seiring dengan peningkatan IPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur diikuti pula penurunan setiap tahun dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur. Dari laju penurunan angka kemiskinan tersebut belum dapat dikatakan sebagai daerah yang angka kemiskinannya rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah angka kemiskinan yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan yaitu dari 247,10 ribu jiwa di tahun 2011 menjadi 246,10 ribu jiwa. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kondisi jumlah penduduk miskin menurut sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah pemekaran tidak termasuk Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada tahun 2013 terbanyak ada di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,06%. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah ada pada Kota Balikpapan sebesar 2,48%. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam lingkup provinsi juga menunjukkan adanya penurunan, dimana pada tahun 2006 persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur sebesar 11,41% turun menjadi 6,38% pada tahun 2013.

Kebijakan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan manusia. Seperti pada pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi di Kalimantan Timur secara umum sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan anggaran ini juga didorong dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh masing-masing pemerintah daerah. Pada tahun 2006 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebesar 561,41 milyar rupiah menjadi 1.742,20 milyar rupiah pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan rata-rata selama delapan tahun sebesar 35,57%. Peningkatan ini tidak serta merta selalu mengalami peningkatan, karena pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 24,74% atau 292,56 milyar rupiah, tetapi pada tahun 2011 hingga tahun 2013 kembali mengalami peningkatan anggaran.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini dipercaya sebagai salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian UNDP mengajukan indikator lain yang dianggap lebih baik guna mengukur keberhasilan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan IPM dan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan ekonomi di daerah.

Kewenangan otonomi daerah, diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan

dan anggaran keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi, pemerintah daerah perlu merealokasi pembiayaan publik sektor pendidikan dan kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Aloysius Gunadi Brata (2002) mengenai Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan multi persamaan dengan metode *two-stage least square* (TSLS). Penelitian Rinda Ayun Anggraini dan Luthfi Muta'ali (2010) tentang Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Penelitian Rinda Ayun Anggraini dan Luthfi Muta'ali (2010) tentang Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Bambang Bemby Soebyakto dan Abdul Bashir (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tipologi Dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini *Klassen Typology*,

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa "*social development is economic development*" (Mubyarto, 2004). Menurut Todaro (2000), sumber daya manusia dari suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya material, merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Laporan tahunan UNDP secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama (*sustainable*). Agar berjalan positif dan berkelanjutan harus ditunjang oleh kebijakan sosial (*social policy*) pemerintah yang pro pembangunan manusia (sosial).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Salvatore (2006) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana PDB riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Sasaran berupa kenaikan produksi riil per kapita dan taraf hidup (pendapatan riil per kapita) merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan pengarahannya sumber-sumber produksi.

Teori Jumlah Penduduk Optimal, Teori ini dikembangkan oleh kaum klasik. Menurut teori tersebut, berlaku *the law of diminishing return* menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, akan menurunkan tingkat output perekonomian. Agar penambahan tenaga kerja dapat meningkatkan output, yang harus dilakukan adalah investasi barang modal dan sumber daya manusia yang menunda terjadinya gejala *the law of diminishing return* atau hukum hasil yang semakin menurun.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan berdasarkan teori-teori klasik sebelumnya yang telah disempurnakannya. Fokus dari teori neo klasik mengenai stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Adapun beberapa asumsi penting dalam memahami model Solow (Rahardja. 2001:195):

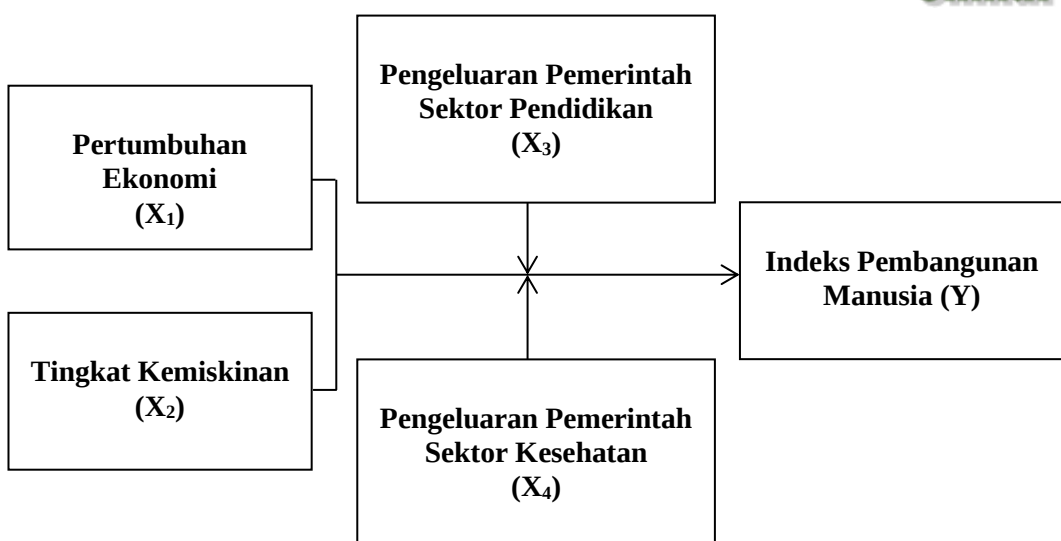
Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Romer (1986) merupakan pengembangan teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik. Kelemahan model Klasik maupun Neo klasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksogen.

Teori Harrod-Domar dikembangkan secara terpisah dalam periode yang bersamaan oleh E.S. Domar (1947, 1948) dan R.F. Harrod (1939, 1948). Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung (Boediono, 1985:68).

Menurut W. W. Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya "*The Stage of Economic*" (1960).

Menurut W. W. Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya "*The Stage of Economic*" (1960),

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di gambarkan model skematis atau kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar.1.
Kerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Batasan pengertian dari penggunaan variabel dalam penelitian dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y) adalah indikator capaian pembangunan manusia yang dihitung dari komponen indeks pendidikan, indeks harapan hidup, dan indeks daya beli dan diukur dalam satuan persen (%).
2. Pertumbuhan ekonomi (X_1) adalah perubahan PDRB kabupaten/kota atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 dalam periode satu tahun yang diukur dengan satuan persen (%).
3. Tingkat kemiskinan (X_2) adalah persentase jumlah penduduk yang miskin, dimana perhitungannya menggunakan batas garis kemiskinan dan pendekatan kemiskinan indikator baru yang membedakan antara penduduk yang mendekati miskin (*near poor*), miskin (*poor*), dan sangat miskin (*poorest*) diantara jumlah penduduk total.
4. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah yang merupakan pengeluaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari:
 - a. Sektor pendidikan (X_3) adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dari total pengeluaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diukur dalam satuan rupiah.
 - b. Sektor kesehatan (X_4) adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari total pengeluaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diukur dalam satuan rupiah.

Alat Analisis

Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, dimana berdasarkan kerangka konsep jika dijabarkan secara matematis, maka hubungan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad \dots(1)$$

Secara ekonometrika persamaan (1) diubah untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu \quad \dots(2)$$

Dimana :

Y	=	Indeks Pembangunan Manusia
X ₁	=	Pertumbuhan Ekonomi
X ₂	=	Tingkat Kemiskinan
X ₃	=	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebagai variabel moderator
X ₄	=	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebagai variabel moderator
β ₀	=	Konstanta
β ₁ ... β ₄	=	Koefisien Regresi
μ	=	<i>error term.</i>

PEMBAHASAN

Hasil analisis yang diperoleh dari hasil pengolahan data dari model penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM Di Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian ini pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t pada taraf signifikan sebesar 5%. Dari hasil analisa diperoleh nilai masih dibawah 0,05.

Hubungan positif dan tidak signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Timur tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari adanya pertumbuhan ekonomi tidak membawa perubahan pada capaian pembangunan manusia secara langsung. Pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena adanya peningkatan pada sektor-sektor perekonomian. Namun peningkatan tersebut tidak dapat meningkatkan pembangunan manusia (IPM).

Namun dalam hal ini pembangunan ekonomi masih diyakini harus sejalan dengan pembangunan sosial sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan sosial; dan sebaliknya, pembangunan sosial dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah

berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Pembangunan pada sektor-sektor tersebut mendorong tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan pemeratakan distribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Sehingga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori atau proses penetasan ke bawah (*trickle down effect*). Dalam bidang ekonomi, pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sehingga akan mendorong daya beli untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Hubungan negatif dan tidak signifikannya variabel tingkat kemiskinan terhadap variabel pembangunan manusia (IPM) tidak sesuai dengan hipotesis dan teori. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak mempunyai efek atau pengaruh secara langsung terhadap masalah pencapaian pembangunan manusia melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mempunyai kapabilitas untuk melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu. Dengan demikian, tingkat kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Jika individu tidak berada dalam kondisi miskin, maka segala kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Selain dapat mencukupi kebutuhan makannya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat terpenuhi. Penduduk miskin dapat melanjutkan sekolahnya, berobat ke dokter atau puskesmas, mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Pemenuhan kebutuhan tersebut akan meningkatkan kualitas penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan IPM. Meskipun tidak mempengaruhi secara langsung, perbaikan IPM melalui pendidikan dan kesehatan terhadap orang miskin di suatu wilayah akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan/atau peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan melepaskannya dari lingkaran kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan variabel mediator yang memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, tetapi tidak signifikan. Hubungan positif dan tidak signifikannya variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dalam memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Kalimantan Timur tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang ada. Dengan anggaran tersebut, pemerintah belum dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, buku-buku, kebutuhan laboratorium, ataupun beasiswa untuk murid yang tidak mampu. Dengan

demikian, kebijakan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, merupakan investasi yang secara tidak langsung dapat memperbaiki kualitas manusia.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti masalah pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Selain itu, investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang harus didukung dengan pembiayaan yang memadai dan merata.

Dalam APBD, sektor pendidikan pada umumnya mendapat alokasi terbesar sebagai cerminan dari prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur dan sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan pengalokasian yang baik dan tepat sasaran, investasi untuk sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kemajuan sosial (berkurangnya angka kemiskinan) dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan variabel mediator yang memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dengan pengaruh yang signifikan. Hubungan positif dan signifikannya variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dengan pembangunan manusia di Kalimantan Timur sesuai dengan teori dan hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini. Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan banyak dinikmati oleh masyarakat. Anggaran tersebut cenderung memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak masyarakat memperoleh bantuan biaya pengobatan di rumah sakit melalui jaminan kesehatan daerah, sehingga banyak yang berobat yang menggunakan layanan jaminan kesehatan tersebut.

Namun masih adanya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan lebih banyak digunakan untuk batas penggunaan tertentu (khusus) yang tidak bersifat meluas. Anggaran tidak merata digunakan untuk program dan kegiatan yang bersifat kuratif, preventif, dan operasional. Dan ketiga, meskipun ada peningkatan anggaran sektor kesehatan untuk jasa pelayanan, program-program kesehatan, maupun suplai obat dan alat-alat kesehatan, namun tidak diikuti oleh fasilitas tambahan seperti infrastruktur jalan, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga hal ini hanya sedikit atau bahkan tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas kesehatan dan pembangunan manusia.

Hal serupa telah dilaporkan dalam Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 (World Bank, 2007) yang menyebutkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada publikasi yang melaporkan adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terhadap tingkat kematian ibu dan bayi yang

melahirkan. Meskipun ada kenaikan anggaran untuk sektor kesehatan, dalam penggunaannya tidak sesuai dengan masalah dan keadaan riil di lapang.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dengan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ditemukan tidak memiliki kekuatan tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil yang diperoleh pada uji residual, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bukan merupakan variabel moderating, tetapi merupakan variabel yang berdiri sendiri sebagai variabel prediktor (independen) yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia (IPM). Selain itu, pada uji residual tersebut, ternyata diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa IPM tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang di-proxy dengan IPM harus didukung dengan kebijakan pemerintah melalui alokasi sumber pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan manusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup.

Pengeluaran atau belanja pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal sumberdaya manusia (human capital investment). Oleh karena itu, peranan dan kedudukannya dalam mendorong kemajuan ekonomi di dalam suatu negara amatlah penting. Pentingnya peranan investasi dalam pendidikan juga diperkuat oleh hasil yang dilakukan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2011) yang menyatakan bahwa alokasi belanja pemerintah untuk sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) tidak dapat berdiri sendiri sebagai peubah independen dalam mempengaruhi kemiskinan, tetapi harus berinteraksi dengan peubah lainnya yaitu indeks pembangunan manusia. Temuan dalam studi ini juga diperkuat oleh temuan dari beberapa lainnya di sejumlah negara di Asia antara lain Fan, Zhang dan Zhang (2002) di China, yang menyebutkan bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikanlah yang memiliki dampak paling besar terhadap penurunan kemiskinan.

Hal ini merupakan keterbatasan studi ini, karena studi ini lebih menekankan kepada political will dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan manusia yang dilihat dari kebijakan pengeluaran sektor publik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu pengeluaran bidang pendidikan.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dengan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Hasil yang diperoleh pada uji residual, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan bukan merupakan variabel moderating, tetapi merupakan variabel yang berdiri sendiri sebagai variabel prediktor (independen) yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia (IPM), dimana hasil perhitungan juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Selain itu, pada uji residual tersebut, ternyata diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tingkat kemiskinan tidak berfungsi sebagai variabel independen maupun berinteraksi dengan variabel independen lainnya (variabel pengeluaran pemerintah lainnya) dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi pembangunan manusia. Hal tersebut mengandung makna bahwa untuk menurunkan tingkat kemiskinan harus didukung dengan kebijakan pemerintah melalui alokasi sumber pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan manusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup.

Dalam berbagai literatur yang ada, menunjukkan bahwa tingkat perekonomian yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan manusia melalui peningkatan kapabilitas penduduk yang konsekuensinya adalah pada produktivitas dan kreativitas penduduk. Oleh karena itu, dukungan sumber dana dari pemerintah terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia seperti pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia yang ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. (Aloysius Gunadi Brata, 2002).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kecenderungan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sektor publik, namun karena masih minimnya alokasi dana tersebut menyebabkan belum adanya pengaruh pengeluaran sektor kesehatan tersebut terhadap kemiskinan dan jika diinteraksikan dengan variabel pembangunan manusia (IPM), pengaruhnya masih sangat kecil. Menurut Agus Salim (2007), pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan yang pro poor yang mempunyai dampak yang negatif terhadap kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Di samping itu, kebijakan pengeluaran tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya terhadap pembentukan modal manusia (human capital). Kebijakan inilah yang dianggap sebagai kebijakan yang berdampak ganda (win win policies).

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka pembangunan manusia tidak akan terwujud. Secara logis hal ini bisa dikaitkan

dengan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, di mana jika pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin semakin tidak terjangkau, maka kemiskinan akan terus meningkat. Hal tersebut disebabkan karena penduduk miskin yang sakit dan tidak mampu berobat karena layanan kesehatan yang rendah dan minimnya pengetahuan dari pasien yang bersangkutan untuk menghindari penyakit tersebut, maka secara otomatis dia tidak akan mampu memenuhi ke butuhan dasar dirinya sendiri bahkan mungkin keluarganya.

Lingkaran setan inilah yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, terutama jika kebijakan pemerintah yang dijalankan bukan kebijakan yang pro poor. Hal ini tercermin dari masih minimnya alokasi dana pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Menurut Novianto (2003), esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: 1) akses untuk mendapatkan makanan yang layak, 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4) akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, 6) akses kepada leisure dan entertainment, dan 7) akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sangat besar diharapkan. Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana hasil analisis dan pembahasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

4. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak memperkuat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dimulai dari perbaikan dan perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan dan berlanjut pada sektor-sektor lainnya.
2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penentu dan pengambil kebijakan hendaknya menentukan prioritas pembangunan pada daerah dan sektor yang perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus. Sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan visi dan misi pembangunannya dalam rangka untuk mencapai kemajuan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang merata.
3. Hasil analisis diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini, diperlukan usaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat.
4. Dalam penelitian ini belum dibahas mengenai peranan infrastruktur sosial, baik itu dari pemerintah maupun swasta, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain-lain terhadap capaian pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lanjutan mengenai peranan dan dampak tersebut terhadap pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Tarmizi, 2010. Modal Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal E-Mabis FE-Unimal*, Volume 11, Nomor 3, Oktober 2010. Hal. 1-11.
- Anggraini, Rinda, Ayun, dan Luthfi Muta'ali, 2013. Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011, *Jurnal Bumi Indonesia*, [Vol. 2, No. 3](#), hal. 233-242.
- Anonim, Kaltim Dalam Angka Tahun 2004 - 2014, BPS Kaltim, Samarinda.
- Azahari, A., 2000. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Volume 15. No.1. Hal 56-69.
- Boediono. A, 1985 "*Teori Pertumbuhan Ekonomi*", BPFE, Yogyakarta.
- Brata, Aloysius, Gunadi, 2002. Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 7, No. 2, hal. 113-123.

- Firdausy, C.M. 1998. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Ginting, Charisma, K.S., (2008) “Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia”, *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan*, diakses dari <http://repository.usu.ac.id>.
- Jhingan, M. L., 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press. Jakarta.
- Mankiw, N., Gregory, 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Tiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Mirza, D.S., (2012), “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id>
- Rahardja, 2001, *Teori Ekonomi Mikro*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2005. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit FE UI.
- Salvatore, Dominick, 2006. *Schaum's Outlines: Mikroekonomi* (Terjemahan Bahasa Indonesia), Edisi Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soebeno, A. 2005. Analisis Pembangunan Manusia dan Penentuan Prioritas Pembangunan Sosial di Jawa Timur. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soebyakto, Bambang, Bemby, dan Abdul, Bashir, 2014. *Analisis Tipologi Dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan*. In: *Prosiding Penguatan Industri Keuangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, pp. 519-546.
- Suryana. 2000. *Ekonomika Pembangunan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, Michael, 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-sembilan, Erlangga, Jakarta.
- UNDP, 2011, *Human Development Report*, Oxford University Press, New York, diakses dari <http://hdrstats.undp.org>
- World Bank 2000. 2001. *The Quality of Growth : Kualitas Pertumbuhan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.